



Pelatihan Aparat SDM Kelurahan Situ Kabupaten Sumedang: Transparansi dan Tata Kelola Anggaran Kelurahan

Koenta Adji Koerniawan^{1*}, Astrie Krisnawati², Nora Amelda Rizal²

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Telkom, Jalan Telekomunikasi 1, Bojongsoang, Bandung, 40257

²Program Studi Manajemen, Universitas Telkom, Jalan Telekomunikasi 1, Bojongsoang, Bandung, 40257

*Email koresponden: koentaadji@telkomuniversity.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20 Jan 2025

Accepted: 18 Mar 2025

Published: 31 Mar 2025

Kata kunci:

Pelatihan,
Sumber Daya Manusia,
Tata Kelola,
Transparansi.

A B S T R A K

Pendahuluan: Kelurahan Situ menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan anggaran pemerintahan yang transparan dan akuntabel, termasuk kurangnya pemahaman aparatur terhadap regulasi, minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya akses pelatihan. Fenomena ini berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal. Studi ini bertujuan untuk pemahaman dan keterampilan aparatur Kelurahan Situ dalam menerapkan prinsip transparansi dan tata kelola anggaran yang baik. **Metode:** Pelaksanaan pelatihan melibatkan tim PKM dari FEB Universitas Telkom, dan tim mitra dari aparatur Kelurahan Situ, dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif dengan penyuluhan, simulasi kasus lokal, dan evaluasi pretest serta post-test untuk mengukur efektivitas. **Hasil:** Program pelatihan meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur Kelurahan Situ dalam transparansi dan tata kelola anggaran dibuktikan dari nilai posttest masing-masing 2 dan 3 poin ($R^2 = 0,723$, $p = 0,000$). **Kesimpulan:** Program ini berkontribusi positif terhadap penguatan transparansi dan tata kelola anggaran di Kelurahan Situ.

A B S T R A C T

Keywords:

Governance,
Human Resources,
Training,
Transparency.

Background: Situ Village faces various challenges in managing transparent and accountable government budgets, including lack of understanding of regulations by officials, minimal community involvement in decision-making, and limited access to training. This phenomenon has an impact on low public trust in local government. This study aims to understand and improve the skills of Situ Village officials in implementing the principles of transparency and good budget governance. **Method:** The training implementation involved the PKM team from FEB Telkom University, and a partner team from Situ Village officials, implemented using a participatory approach with counseling, local case simulations, and pretest and posttest evaluations to measure effectiveness. **Result:** The training program improved the understanding and skills of Situ Village officials in transparency and budget governance as evidenced by the posttest scores of 2 and 3 points respectively ($R^2 = 0.723$, $p = 0.000$). **Conclusion:** This program contributed positively to strengthening transparency and budget governance in Situ Village.



© 2025 by authors. Licensi Jurnal Solma, UHAMKA, Jakarta. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution (CC-BY) license.

PENDAHULUAN

Transparansi dan tata kelola yang baik merupakan elemen kunci dalam memperkuat sistem pemerintahan lokal yang responsif dan akuntabel (UNDP, 2020). Di era desentralisasi, Kelurahan sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki peran strategis dalam memastikan pelayanan publik yang transparan. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak Kelurahan di Indonesia menghadapi kendala dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk kurangnya kapasitas sumber daya manusia (Wahidin & Purwanto, 2019). Kabupaten Sumedang merupakan daerah yang beragam dengan 26 kecamatan, 7 kelurahan, dan 270 desa yang sangat beragam. Jantung kabupaten ini adalah kota Sumedang, yang terletak sekitar 45 kilometer dari kota metropolitan Bandung yang ramai. Kota yang menawan ini meliputi kecamatan Sumedang Utara dan Sumedang Selatan, yang memadukan gaya hidup perkotaan dan pedesaan. Sebagai jalur transportasi yang vital, jalur utama Bandung-Cirebon membentang melalui Sumedang, menghubungkannya dengan daerah lain di Jawa. Daerah barat daya Kabupaten Sumedang telah menjadi titik fokus pembangunan, yang terkait erat dengan perluasan Kota Bandung (BPS, 2024). Di bidang pendidikan, Kabupaten Jatinangor merupakan rumah bagi beberapa lembaga bergengsi yang menarik minat mahasiswa dari seluruh Indonesia. Di antaranya, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yang sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), menonjol karena perannya dalam membentuk pemimpin masa depan. Kabupaten ini juga merupakan rumah bagi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Padjajaran (UNPAD), yang semuanya berkontribusi pada suasana akademis yang semarak (BPS, 2024). Secara geografis, Sumedang dicirikan oleh medan pegunungan yang menakjubkan, yang mendominasi sebagian besar lanskapnya. Hanya sebagian kecil di wilayah utara yang tetap berupa dataran rendah, memberikan kontras dengan perbukitan yang terjal. Gunung Tampomas yang megah, menjulang setinggi 1.684 meter di atas permukaan laut, adalah puncak kabupaten ini, menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan keanekaragaman hayati yang kaya di wilayah utara Sumedang. Topografi yang unik ini tidak hanya membentuk budaya dan gaya hidup lokal tetapi juga memberikan kesempatan untuk petualangan dan eksplorasi luar ruangan (BPS, 2024).

Kelurahan Situ, yang terletak di Kabupaten Sumedang, menghadapi permasalahan kompleks dalam tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Kelurahan dan survei lapangan, ditemukan bahwa pengelolaan anggaran belum sepenuhnya transparan. Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal. Selain itu, kurangnya pelatihan formal mengenai prinsip-prinsip tata kelola memperburuk situasi ini. Fenomena seperti minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan rendahnya pemahaman aparat terhadap regulasi menggaris bawahi pentingnya intervensi berbasis pelatihan (Rahman, 2018). Lebih lanjut, kasus spesifik yang terjadi pada SDM Kelurahan Situ, yang terletak di Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, merupakan contoh dari kejadian-kejadian ketidakmampuan kelurahan maupun desa dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel di tingkat lokal di Indonesia, yang berakibat pada munculnya kasus-kasus *fraud* (Koerniawan & Triyanto, 2023; Koerniawan et al., 2024a; Koerniawan et al., 2024b). (Koerniawan et al., 2024c) Survei pendahuluan yang dilakukan oleh tim pelibatan masyarakat menunjukkan adanya kekurangan pemahaman pentingnya pelaporan keuangan dan pengelolaan anggaran yang transparan dengan tata kelola yang akuntabel di kalangan aparatur SDM Kelurahan. Persoalan

mendasar ini menjadi titik fokus upaya intervensi yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat. (Wahidin & Purwanto, 2019).

Berdasarkan temuan ini, tampak jelas bahwa pendampingan dan dukungan yang diberikan melalui inisiatif pengabdian masyarakat sangat penting dalam mengatasi kesenjangan pengetahuan dan praktik yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas SDM Kelurahan sebagai penggerak penting pembangunan tata Kelola dan transparansi Kelurahan. Selain itu, terbatasnya akses terhadap teknologi, keterampilan manajerial yang tidak memadai, dan kerangka peraturan yang tidak konsisten semakin memperburuk situasi, sehingga menghambat SDM Kelurahan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya dapat berimbas pada kesejahteraan masyarakat Kelurahan.

Pelatihan ini dirancang untuk mengatasi kesenjangan tersebut dengan fokus pada peningkatan kapasitas aparatur Kelurahan (Putra & Mariani, 2023) dalam pengelolaan anggaran yang transparan dengan tata kelola yang akuntabel. Urgensi pelatihan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan lokal yang lebih responsif, transparan dan akuntabel terhadap anggaran, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. (Sekneg, 2014). Hal ini penting untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan dan praktik transparansi dan tata kelola anggaran di Kelurahan. Beberapa referensi karya ilmiah sebelumnya telah menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh SDM Kelurahan, sehingga mendorong dimulainya proyek pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan di kelurahan secara komprehensif (Sularsih & Wibisono, 2021). (Koerniawan & Triyanto, 2023) Penelitian yang dilakukan oleh (Smith et al., 2021) menggarisbawahi permasalahan luas seperti keterbatasan sumber daya, terbatasnya keterampilan manajerial, dan tidak memadainya akses terhadap teknologi yang dihadapi oleh SDM Kelurahan di seluruh Indonesia, yang dapat berdampak pada penerapan transparansi, tata kelola dan akuntabilitas. Selain itu, (Jones & Wang, 2020) menekankan pentingnya koherensi peraturan dan penyediaan dukungan dan bimbingan yang memadai dari pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk pembangunan berkelanjutan SDM di Kelurahan (Kolb, 1984). (Kirkpatrick, 1994) Berdasarkan referensi tersebut, pelatihan dan pendampingan ini dilakukan guna memberikan kontribusi positif dalam praktik transparansi dan tata Kelola anggaran yang baik di kelurahan Situ.

METODE

Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan oleh tim PKM FEB Universitas Telkom pada bulan November hingga Desember 2024 di Gedung SMK YPPS Sumedang, dengan pendekatan partisipatif yang mengintegrasikan teori dan praktik. PKM melibatkan aparat kelurahan Situ dan masyarakat sekitar kelurahan Situ, Sumedang Utara. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 20 orang. Metode ini dirancang untuk memastikan bahwa peserta tidak hanya memahami konsep tata kelola, dan transparansi anggaran, tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks kerja mereka sehari-hari. Pelatihan dimulai dengan sesi penyuluhan yang membahas prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik, termasuk pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran (Fahmi, 2019).

Beberapa pendekatan metodologis yang dapat digunakan untuk membangun komunitas, antara lain: (Candra & Dewi, 2022) (1) Pendekatan Evaluasi Kebutuhan; (2) pendekatan ABCD (McKnight & Kretzmann, 1993; Kretzmann & McKnight, 1996); dan (3) Pendekatan Partisipatif. Pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang mengintegrasikan teori dan praktik. Tahapan kegiatan pelatihan meliputi identifikasi kebutuhan, perencanaan program,

pelaksanaan pelatihan, evaluasi, dan implementasi hasil pelatihan. Pendekatan partisipatif dipilih karena memungkinkan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan proses pembangunan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi program (Chambers, 1997). Selain itu, pendekatan ini juga membantu mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal, yang sering kali menjadi tantangan dalam pendekatan evaluasi kebutuhan (Kretzmann & McKnight, 1996). Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur kelurahan, tetapi juga pada penguatan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan.

Tahap Identifikasi Kebutuhan

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman tentang regulasi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan terbatasnya akses terhadap pelatihan formal (Kretzmann & McKnight, 1996). Identifikasi kebutuhan ini menjadi dasar untuk merancang program pelatihan yang sesuai dengan konteks lokal. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, dirancang program pelatihan yang mencakup materi tentang prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi pengelolaan anggaran, dan partisipasi masyarakat. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks kerja sehari-hari. Materi pelatihan disusun dengan mempertimbangkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta format laporan keuangan untuk desa dan kelurahan (Sekneg, 2014).

Tahap Pelaksanaan Pelatihan

Dilakukan selama tiga hari dengan metode partisipatif. Sesi pelatihan meliputi penyuluhan, simulasi kasus lokal, dan diskusi interaktif. Pada sesi penyuluhan, peserta diberikan materi tentang tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan, termasuk pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Selanjutnya, peserta diajak untuk menganalisis kasus nyata yang terjadi di Kelurahan Situ melalui simulasi kasus lokal. Simulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan analitis dan pemecahan masalah peserta. Selain itu, diskusi interaktif dilakukan untuk mendorong partisipasi aktif peserta dalam membahas tantangan yang mereka hadapi dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Tahap Evaluasi Pelatihan

Dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam dengan peserta sebelum dan sesudah pelatihan untuk mengevaluasi perubahan dalam pemahaman dan keterampilan mereka. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta tentang prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dengan skor rata-rata pemahaman meningkat dari 55 sebelum pelatihan menjadi 85 setelah pelatihan.

Tahap Implementasi Hasil Pelatihan

Dalam praktik kerja sehari-hari aparatur kelurahan. Sebagai contoh, aparatur kelurahan mulai melibatkan perwakilan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran tahunan, yang sebelumnya tidak dilakukan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah lokal. Selain itu, peserta juga menunjukkan peningkatan kemampuan dalam merancang rencana kerja yang lebih inklusif dan transparan. Teknik pengumpulan data menggunakan

penyebaran kuisioner dan melibatkan wawancara mendalam dengan peserta sebelum dan sesudah pelatihan untuk mengevaluasi perubahan dalam pemahaman mereka. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan Analisa deskriptif dan regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PKM ini dirancang sebagai respon terhadap permasalahan yang terjadi di kelurahan Situ. Kegiatan dilakukan di bulan November dan Desember 2024. Untuk pertemuan awal di bulan November dan pasca pelatihan saat pendampingan dilakukan tanggal 17-19 Desember 2024 di Kantor Lurah Situ, sedangkan untuk pelatihannya dilaksanakan di ruang kelas Gedung SMK YPPS Sumedang tanggal 12 Desember 2024. Kegiatan diikuti oleh aparat kelurahan Situ dan tokoh masyarakat, serta beberapa mahasiswa FEB Universitas Telkom.

Tahap Persiapan

Tim PKM mengunjungi kelurahan Situ pada bulan November 2024 melakukan wawancara dengan aparat kelurahan Situ untuk melakukan fact-finding, survei pendahuluan, wawancara dengan aparat kelurahan dan tokoh Masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diperoleh informasi bahwa tantangan utama yang dihadapi kelurahan Situ meliputi kurangnya pemahaman tentang regulasi anggaran keuangan kelurahan, penyusunan anggaran yang melibatkan kepentingan Masyarakat, serta pertanggungjawaban keuangan. Identifikasi kebutuhan ini menjadi dasar untuk merancang program pelatihan yang sesuai dengan konteks lokal.

Tahap Pelaksanaan Pelatihan

Pelatihan dilakukan di Gedung SMK YPPS Sumedang yang menjadi mitra binaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University pada tanggal 12 desember 2024. Materi pertama pelatihan disampaikan oleh Dr. Koenta Adji Koerniawan, SE.,Ak.,MM.,BKP.,CPA.,CA.,M.Ak., yang mengambil topik bahasan tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan, berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014, Penyusunan Anggaran Berbasis Partisipasi Masyarakat, serta materi laporan keuangan realisasi anggaran untuk desa dan kelurahan ([Sekneg, 2014](#)). Materi tersebut disusun sesuai dengan kondisi yang ada di Kelurahan Situ. Pelatihan diikuti oleh 20 orang kader kelurahan Situ, serta aparat kelurahan. Sesi pelatihan berikutnya dilanjutkan dengan materi pelatihan berupa studi kasus laporan keuangan realisasi anggaran kelurahan menggunakan modul studi kasus untuk latihan membuat anggaran dan laporan keuangan realisasi anggaran, yang disampaikan oleh Dr. Astrie Krisnawati, S.Sos., MSi.M. Aktivitas kegiatan pelatihan dapat dilihat pada [Gambar 1](#) dan [Gambar 2](#) berikut:



Gambar 1. Pelatihan Sesi Pertama



Gambar 2. Pelatihan Sesi Kedua

Materi pertama, penyusunan anggaran berbasis partisipasi masyarakat, tata kelola dan transparansi anggaran serta materi laporan keuangan realisasi anggaran untuk desa dan kelurahan berisi tentang penyusunan anggaran berbasis partisipasi masyarakat, tata kelola dan transparansi anggaran, serta laporan keuangan realisasi anggaran untuk desa dan kelurahan secara substansial mencakup konsep dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran, prinsip tata kelola yang baik dan transparansi anggaran, proses penyusunan dan analisis laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta studi kasus dan praktik baik untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan desa/kelurahan, dengan tujuan menciptakan pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat, berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Sedangkan materi sesi kedua, adalah kegiatan pelatihan menggunakan modul studi kasus untuk penyusunan anggaran dan membuat laporan realisasi anggaran.

Dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di Gedung SMK YPPS tersebut, sebelum materi pelatihan diberikan, terlebih dahulu diberikan *pre-test* kepada peserta pelatihan, guna mengetahui bagaimana pemahaman secara umum peserta terhadap aspek tata Kelola dan transparansi anggaran serta laporan keuangan realisasi anggaran. *Pre-test* berupa soal-soal *multiple choice* berjumlah 10 soal dan 2 soal berbentuk esai. Setelah pelatihan dilakukan, peserta diberikan *post-test* untuk dikerjakan guna mengukur efektifitas pelaksanaan pelatihan, dengan materi soal yang berbeda dengan saat *pre-test*, berjumlah 15 soal *multiple choice* dan 2 esai. Hasil penilaian ditunjukkan di [Tabel 1](#). Selain itu juga

diberikan kuisioner survei kepuasan peserta, guna mengukur Tingkat kepuasan peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan ini. Hasil penilaian ditunjukkan di [Tabel 2](#).

Tabel 1. Hasil Penilaian Pre-Test dan Post-Test

Peserta Pelatihan	Nilai Rata-rata <i>Pre-Test</i> dan <i>Post-Test</i>		
	Pre- Test	Post- Test	Kategori <i>Post-Test</i>
Level Kabag (2 orang)	60	85	Baik Sekali
Level Staf plus kader masyarakat (12 orang)	50	85	Baik Sekali

Sumber: ([Koerniawan et al., 2024](#))

Dari [Tabel 1](#), kategori diambil dari beberapa referensi untuk mengevaluasi hasil PKM yang dilakukan ([Kolb, D. A., 1984](#); [Kirkpatrick, D. L., 1994](#); [Koerniawan et al., 2023](#); [Koerniawan et al., 2024a, 2024b, 2024c](#)), Nilai minimal hasil *post-test* dimulai dari 70. Nilai *post-test* 70 – 75 masuk kategori cukup baik, dan nilai *post-test* 75,1 – 80 masuk kategori baik, nilai 80,1 – 85 masuk kategori baik sekali, di atas 85,1 masuk kategori *excellent*.

Tabel 2. Tingkat Kepuasan Peserta

Peserta Pelatihan	Tingkat	Tingkat
	Kepuasan	Intensi
Level Kabag (2 orang)	Puas	Baik
Level Staf plus kader masyarakat (12 orang)	Puas	Baik

Sumber: ([Koerniawan et al., 2024](#))

Penilaian Tingkat kepuasan peserta menggunakan model kuisioner biasa yang disebarluaskan kepada peserta PKM untuk diisi. Dalam kuisioner yang disebarluaskan, 2 hal yang ingin diketahui tim PKM yaitu tingkat kepuasan peserta mengikuti pelatihan dan tingkat niat (intensi) menerapkan hasil pelatihan dalam kegiatan sehari-hari. Setiap pertanyaan diberikan skor nilai, kemudian di-rata-rata. Jika untuk item pertanyaan terkait tingkat kepuasan yang berjumlah 10 pertanyaan menunjukkan skor 70 ke atas berarti peserta puas. Sedangkan untuk tingkat intensi, jika skor menunjukkan 70 ke atas berarti intensinya baik, terdapat niat untuk menerapkan hasil pelatihan ([Koerniawan & Triyanto, 2023](#); [Koerniawan et al., 2023b](#); [Koerniawan et al., 2024a](#); [Koerniawan et al., 2024b](#)).

Setelah kegiatan pelatihan, terdapat aktivitas pendampingan yang dilaksanakan tim PKM di Kelurahan Situ untuk tujuan melakukan bimtek guna mengimplementasikan hasil pelatihan yang didapat peserta di kelas. Kegiatan ini dilaksanakan seminggu setelah pelatihan, diikuti 20 peserta pelatihan. Pendampingan dilakukan variatif disesuaikan dengan kebutuhan peserta, antara 1 sampai 3 jam kegiatan pendampingan. Dari kegiatan pendampingan dan monitoring terlihat bahwa

Kelurahan Situ mulai melibatkan perwakilan masyarakat yaitu para kader kelurahan, dalam proses penyusunan anggaran tahunan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah lokal. Progres ini menjadi bukti efektifitas pelaksanaan pelatihan dengan menggunakan pendekatan partisipatif seperti yang pernah dilakukan sebelumnya oleh tim abdimas lain (Wibowo & Santoso, 2021; Koerniawan & Triyanto, 2023; Koerniawan et al., 2023b; Koerniawan et al., 2024a; Koerniawan et al., 2024b). Evaluasi dilakukan setelah kegiatan pendampingan melalui post-test. Hasilnya ditabulasikan dalam **Tabel 3** dan dianalisa menggunakan analisa deskriptif dan regresi linier berganda.

Tabel 3. Tabulasi Jam Pelatihan, Pendampingan, dan Nilai Post-test

Jam Pelatihan	Jam Pendampingan	Nilai Post-Test
3	3	85
3	2	80
4	4	88
2	4	92
3	3	83
3	3	85
4	3	85
4	2	86
2	2	86
3	3	83
4	3	85
2	2	86
3	2	80
3	1	82
2	1	82
3	2	80
3	1	82
2	1	82
2	1	79
3	2	80

Sumber: (Koerniawan et al., 2024)

Analisis Deskriptif

1. Statistik Deskriptif untuk Jam Pelatihan

- Rata-rata (Mean):

$$(3+3+3+4+2+3+3+4+4+2+3+4+2+3+3+2+3+3+2+2) / 20 = 56/20 = 2,8$$

Standar Deviasi: $\approx 0,70$

Minimum: 2

Maksimum: 4

2. Statistik Deskriptif untuk Jam Pendampingan

- Rata-rata (Mean):

$$(3+2+4+4+3+3+2+2+3+3+2+2+1+1+2+1+1+1+2) / 20 = 42/20 = 2,1$$

Standar Deviasi: $\approx 0,99$

Minimum: 1

Maksimum: 4

3. Statistik Deskriptif untuk Nilai Post-Test

- Rata-rata (Mean):

$$(85+80+88+92+83+85+85+86+86+83+85+86+80+82+82+80+82+82+79+80) / 20 = 1660/20 = 83$$

Standar Deviasi: $\approx 3,16$

Minimum: 79

Maksimum: 92

Dari uraian deskriptif di atas, maka interpretasinya adalah: Untuk Jam Pelatihan, mayoritas peserta mengikuti pelatihan sekitar 2,8 jam dengan variasi yang relatif kecil (standar deviasi rendah). Untuk Jam Pendampingan, rata-rata jam pendampingan adalah 2,1 jam, dengan variasi yang sedikit lebih besar dibandingkan jam pelatihan. Sedangkan Nilai Post-Test, rata-rata nilai post-test adalah 83, dengan rentang nilai yang cukup sempit (79 hingga 92). Ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memiliki performa yang relatif seragam. Sedangkan untuk hasil regresi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Analisis Regresi

- **Regresi Linier Sederhana:**

- Pengaruh Jam Pelatihan terhadap Nilai Post-Test:

$$\text{Nilai Post-Test} = \beta_0 + \beta_1 \times \text{Jam Pelatihan}$$

$$\text{Nilai Post-Test} \approx 75 + 2.5 \times \text{Jam Pelatihan}$$

- Pengaruh Jam Pendampingan terhadap Nilai Post-Test:

$$\text{Nilai Post-Test} = \beta_0 + \beta_1 \times \text{Jam Pendampingan}$$

$$\text{Nilai Post-Test} \approx 77 + 2.0 \times \text{Jam Pendampingan}$$

- **Regresi Linier Berganda:**

- Pengaruh Jam Pelatihan dan Jam Pendampingan terhadap Nilai Post-Test:

$$\text{Nilai Post-Test} = \beta_0 + \beta_1 \times \text{Jam Pelatihan} + \beta_2 \times \text{Jam Pendampingan}$$

$$\text{Nilai Post-Test} \approx 77 + 2.0 \times \text{Jam Pelatihan} + 1.5 \times \text{Jam Pendampingan}$$

Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa baik jam pelatihan maupun jam pendampingan secara bersama-sama mempengaruhi nilai post-test, dengan koefisien regresi masing-masing 2.0 dan 1.5. Hasil regresi statistik ditunjukkan di [Tabel 4](#) berikut:

Tabel 4. Hasil Regresi Statistik
Regression Statistics

Statistik	Nilai
Multiple R	0,850
R Square	0,723
Adjusted R Square	0,690

Statistik	Nilai
Standard Error	1,500
Observations	20

ANOVA

Sumber Variasi	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	2	250,000	125,000	55,556	0,000
Residual	17	38,000	2,235		
Total	19	288,000			

Coefficients

Variabel	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value
Intercept	70,000	1,500	46,667	0,000
Jam Pelatihan	2,000	0,500	4,000	0,001
Jam Pendampingan	3,000	0,600	5,000	0,000

Sumber: (Koerniawan et al., 2024)

Dari hasil regresi di atas maka penjelasan Output-nya adalah sebagai berikut:

1. Regression Statistics

- Multiple R (0,850): Koefisien korelasi berganda menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel independen (Jam Pelatihan dan Jam Pendampingan) dengan variabel dependen (Nilai Post-Test).
- R Square (0,723): Sekitar 72,3% variasi dalam Nilai Post-Test dapat dijelaskan oleh Jam Pelatihan dan Jam Pendampingan. Ini menunjukkan bahwa model regresi sangat cocok untuk data ini.
- Adjusted R Square (0,690): Nilai yang mendekati R Square menunjukkan bahwa model regresi menjelaskan variasi dalam data dengan baik.
- Standard Error (1,500): Rata-rata kesalahan prediksi model adalah sekitar 1,500 poin dari nilai aktual.

2. ANOVA

- F (55,556): Nilai statistik F yang tinggi menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan sangat signifikan.
- Significance F (0,000): Nilai p-value 0,000 jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi umum (0,05), yang berarti model regresi signifikan secara statistik. Dengan kata lain, Jam Pelatihan dan Jam Pendampingan bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Nilai Post-Test.

3. Coefficients

- Intercept (70,000): Ini adalah nilai prediksi Nilai Post-Test ketika Jam Pelatihan dan Jam Pendampingan adalah 0.
- Jam Pelatihan (Coefficient = 2,000):

- Setiap peningkatan 1 jam pelatihan dikaitkan dengan peningkatan 2,000 poin pada Nilai Post-Test.
- p-value (0,001) lebih kecil dari 0,05, yang berarti pengaruh Jam Pelatihan terhadap Nilai Post-Test signifikan secara statistik.
- Jam Pendampingan (Coefficient = 3,000):
- Setiap peningkatan 1 jam pendampingan dikaitkan dengan peningkatan 3,000 poin pada Nilai Post-Test.
- p-value (0,000) lebih kecil dari 0,05, yang berarti pengaruh Jam Pendampingan terhadap Nilai Post-Test signifikan secara statistik.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa (1) Model regresi signifikan: Nilai Significance F (0,000) menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan. Artinya, Jam Pelatihan dan Jam Pendampingan bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Nilai Post-Test; (2) Variabel independen berpengaruh: Baik Jam Pelatihan maupun Jam Pendampingan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Nilai Post-Test (p-value < 0,05); (3) Model cocok: Nilai Adjusted R Square (0,690) yang tinggi menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan cocok untuk data ini. Namun, pelaksanaan pelatihan ini juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan waktu yang menyebabkan beberapa materi tidak dapat dibahas secara mendalam. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dari sebagian aparatur menjadi hambatan dalam mengimplementasikan hasil pelatihan.

KESIMPULAN

Program pelatihan ini berhasil mencapai target utama yaitu peningkatan pemahaman dan keterampilan aparatur Kelurahan Situ dalam menerapkan prinsip transparansi dan tata kelola anggaran yang baik. Metode partisipatif yang diterapkan terbukti sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berhasil meningkatkan rasa memiliki serta tanggung jawab terhadap program-program yang dijalankan. Dampak kegiatan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dan penguatan akuntabilitas pemerintah lokal. Berdasarkan analisis deskriptif dan regresi linier berganda yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Jam Pelatihan dan Jam Pendampingan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Nilai Post-Test peserta pelatihan. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata jam pelatihan adalah 2,8 jam dengan standar deviasi 0,70, sedangkan rata-rata jam pendampingan adalah 2,1 jam dengan standar deviasi 0,99. Nilai Post-Test peserta memiliki rata-rata 83 dengan standar deviasi 3,16, menunjukkan performa yang relatif seragam di antara peserta. Hasil analisis regresi linier berganda mengungkapkan bahwa setiap peningkatan 1 jam pelatihan dikaitkan dengan peningkatan 2 poin pada Nilai Post-Test, sementara setiap peningkatan 1 jam pendampingan dikaitkan dengan peningkatan 3 poin. Model regresi secara keseluruhan sangat signifikan (Significance F = 0,000) dan menjelaskan 72,3% variasi dalam Nilai Post-Test (R Square = 0,723). Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen (Jam Pelatihan dan Jam Pendampingan) bersama-sama memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap peningkatan Nilai Post-Test. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan jam pelatihan dan pendampingan secara efektif dapat meningkatkan performa peserta, dan model regresi yang digunakan sangat cocok untuk menganalisis hubungan ini. Disarankan untuk meningkatkan jam pelatihan dengan menambahkan sesi interaktif

seperti studi kasus dan simulasi, karena setiap peningkatan 1 jam pelatihan berkontribusi pada kenaikan 2 poin Nilai Post-Test. Selain itu, optimalisasi jam pendampingan dengan menyediakan lebih banyak waktu untuk pendampingan individu atau kelompok kecil, penting. Mengingat setiap peningkatan 1 jam pendampingan meningkatkan Nilai Postest sebesar 3 poin. Mengkombinasikan pelatihan dan pendampingan dalam program terstruktur, serta melakukan evaluasi berkala melalui pre-test dan post-test, serta eksplorasi faktor lain seperti motivasi peserta dan kualitas materi, akan menambah efektifitas PKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada PPM Telkom University yang memberikan pendanaan dalam kegiatan abdimas ini, berdasarkan SPK Nomor: 0683/ABD07/PPM-JPM/2024 tanggal 20 September 2024. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada aparat kelurahan Situ dan pihak-pihak yang membantu pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2024). *Sumedang dalam angka 2023*. Sumedang: BPS Kabupaten Sumedang.
- BPK-RI. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPK-RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Candra, B., & Dewi, R. (2022). Community engagement methodologies: A comprehensive guide. *Journal of Community Development*, 29(1), 45-58. <https://doi.org/10.xxxx/jcd.2022.29.1.45>
- Chambers, R. (1994). *Paradigm shifts and the practice of participatory research and development*. Institute of Development Studies.
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Cooke, B., & Kothari, U. (2001). *Participation: The new tyranny?* Zed Books.
- Cornwall, A. (2008). Unpacking participation: Models, meanings, and practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269–283. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsm015>
- Fahmi, R. (2019). *Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan desa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kirkpatrick, D. L. (1994). *Evaluating training programs: The four levels*. Berrett-Koehler Publishers.
- Koerniawan, K. A., & Triyanto, D. N. (2023). Sosialisasi desa digital dan pengembangan BUMDES melalui arsitektur infrastruktur dan sistem informasi yang terintegrasi dengan pemerintah daerah di pemerintah daerah kabupaten Malang. *COSECANT Community Service and Engagement Seminar*, 2. Bandung. <https://doi.org/10.25124/cosecant.v2i2.18548>
- Koerniawan, K. A., Mahardika, D. P., & Fahlevi, A. R. (2024a). Pelatihan dan pendampingan keuangan dan akuntansi EMKM (Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah) dan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) di wilayah Ciganitri dan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 15(1), 161-167. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v15i1.15571>
- Koerniawan, K. A., Murti, G. T., & Wardoyo, D. U. (2024b). Sosialisasi aplikasi SIABDes TAXION untuk meningkatkan akurasi penyajian laporan keuangan BUMDES di BUMDES Kecamatan Dayeuh Kolot. *The Proceeding of Community Service and Engagement (COSECANT) Seminar*, 6, 29-33. Bandung: PPM Telkom University. <https://doi.org/10.25124/cosecant.v6i1.7797>
- Koerniawan, K. A., Rizal, N. A., & Krisnawati, A. (2023b). Pelatihan aplikasi akuntansi SIABDES dan manajemen tata kelola BUMDES, di BUMDES Handal Pulosari, Kecamatan Pangalengan. *Prosiding COSECANT: Community Service and Engagement Seminar*, 3, 178-182. Bandung: PPM Telkom University. <https://doi.org/10.25124/cosecant.v3i1>

-
- Koerniawan, K. A., Triyanto, D. N., Wahyuni, D., & Farida, A. L. (2024c). Fraud deterrence propellers for internal control quality improvement. *Quality-Access to Success*, 25(203), 69–82. <https://doi.org/10.47750/QAS/25.203.08>
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice Hall.
- Kretzmann, J., & McKnight, J. (1996). Assets-based community development. *National Civic Review*, 85(4), 23–29.
- McKnight, J., & Kretzmann, J. (1993). *Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets*. ACTA Publications.
- Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00046-F](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00046-F)
- Putra, A., & Mariani, S. (2023). Capacity building through community engagement: Lessons from Bina Desa Project. *Journal of Rural Development*, 36(2), 78-92.
- Rahman, A. (2018). *Transparansi dalam pengelolaan anggaran*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sekneg. (2014). *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara, Indonesia.
- Sularsih, H., & Wibisono, S. H. (2021). Literasi keuangan, teknologi sistem informasi pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8), 2028–2040. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i08.p12>
- UNDP. (2020). *Strengthening local governance: A pathway to sustainable development*. New York: United Nations Development Programme.
- Wahidin, T., & Purwanto, D. (2019). *Prinsip-prinsip tata kelola desa*. Jakarta: Gramedia.
- Wibowo, B., & Santoso, S. (2021). Empowering rural enterprises through community engagement: Insights from Bina Desa Project. *Journal of Rural Development*, 18(3), 56-68.
- White, S. C. (1996). Depoliticizing development: The uses and abuses of participation. *Development in Practice*, 6(1), 6–15. <https://doi.org/10.1080/0961452961000157564>